

PERMULAAN KERUSUHAN AMBON DI TAHUN 1999 DAN REKOMENDASI PENANGANANNYA

Parsudi Suparlan

PENDAHULUAN

Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan hakekat kerusuhan antar-sukubangsa yang terjadi di Ambon yang telah berlangsung sejak tanggal 19 Januari 1999, yang melibatkan sukubangsa Ambon di satu pihak dengan golongan sukubangsa Buton, Bugis, Makassar (BBM) di lain pihak, dan antara penganut agama Islam (warga Ambon, BBM, dan warga berbagai sukubangsa dan asal dari Propinsi Maluku) dengan penganut agama Kristen (warga Ambon dan warga dari berbagai sukubangsa dan asal di Propinsi Maluku).¹ Apa yang ingin

ditunjukkan adalah bahwa kerusuhan massal di Ambon antara sukubangsa dan golongan sosial tersebut pada hake-

Hasil Penelitian berjudul: "*Laporan Penelitian Kerusuhan Ambon dan Rekomendasi Penanganannya*" telah disampaikan kepada Kapolri pada tanggal 29 Maret 1999. Tulisan ini dibuat berdasarkan laporan tersebut.

Terimakasih kepada Bapak Jenderal Polisi Drs. Rusmanhadi, sebagai Kapolri, atas penugasan dan berbagai fasilitas yang telah diberikan kepada Tim Ahli, sehingga penelitian di Ambon telah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Terimakasih kepada Kapolda dan Wakapolda beserta Staf Polda, kepada Kapolres, Wakapolres, dan Staf Polres atas berbagai informasi dan atas akses terhadap berbagai dokumen dan file, dan wawancara terhadap mereka yang ditahan atas tuduhan sebagai provokator.

Terimakasih juga kepada Prof. Dr. J.E Lokollo, SH atas berbagai informasi dan bantuan di lapangan, juga kepada Kapten Pol. J. Matahelumual SH dan Kapten Pol. D. Soplanit SH serta Sersan Pol. Jamaluddin yang telah mendampingi Tim selama melakukan penelitian.

¹ Penelitian Kerusuhan Ambon dilakukan oleh Tim Ahli UI-PTIK dipimpin oleh Prof. Dr. Parsudi Suparlan. Anggota Tim Ahli adalah Prof. Dr. S. Boedhisantoso, Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Letkol. Pol. Drs. Agus Wantoro, MSiK, dan Letkol Pol. Drs. Bambang Wahyono, MSiK. Penelitian lapangan dilakukan dari tanggal 7 s/d 14 Maret 1999.

katnya terjadi karena adanya keresahan sosial dan politik yang meluas dalam kehidupan di kota Ambon. Kehidupan di kota Ambon dirasakan sebagai penuh dengan ketidakadilan yang disebabkan oleh tidak adanya patokan hukum dan sosial yang operasional yang dapat menjamin perlindungan rasa aman dan sejahtera kehidupan warga. Keresahan sosial yang meluas dalam kehidupan kota Ambon tidak akan mewujudkan diri dalam bentuk kerusuhan antar-sukubangsa bila tidak ada pemicunya, yaitu kesewenang-wenangan preman sebagaimana yang juga terjadi di Sambas (Suparlan, 2000: 71-85), dan bila sukubangsa dan keyakinan keagamaan tidak dapat berfungsi sebagai acuan jatidiri bagi pengorganisasian pengelompokan solidaritas dalam konflik. Tujuan akhir tulisan ini adalah menghasilkan rekomendasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan atau mendamaikan secepat mungkin pihak-pihak yang bertikai, dan mengatasi berbagai penderitaan serta kerugian yang diakibatkannya, serta mencegah terulangnya kembali kerusuhan massal tersebut. Jangan sampai korban jiwa dan raga serta harta benda yang sia-sia tersebut terulang kembali.²

² Jumlah Korban Kerusuhan Ambon dari tgl. 19 Januari s/d 11 Maret 1999, tercatat 165 meninggal dunia, 260 luka berat, 201 luka ringan. Jumlah kerugian harta benda:

Dalam tulisan ini, kerusuhan Ambon dilihat sebagai konflik memperebutkan sumber-sumber daya ekonomi, politik, dan sosial (termasuk kehormatan dan gengsi) dalam berbagai arena sosial, politik, dan pemerintahan, terutama dalam arena ekonomi dan bisnis pada tingkat kehidupan umum di pasar. Perebutan sumber-sumber daya tersebut telah terwujud sebagai konflik fisik dan teror untuk dominasi oleh satu kelompok atas kelompok lainnya karena tidak adanya aturan main yang adil dan beradab bagi semua pihak. Corak konflik tersebut juga terwujud karena adanya corak dari situasi-situasi sosial dalam kehidupan masyarakat kota Ambon, dan juga di Propinsi Maluku, yang kehidupan warganya didominasi oleh pentingnya kesukubangsaan serta keyakinan keagamaan sebagai dampak dari kebijaksanaan pemerintah Orde Baru yang sentralistik dan menekankan keseragaman, dan oleh kehidupan politik kekuasaan golongan dan oknum. Kesemuanya ini dipicu lagi oleh turut campur dan bermainnya berbagai unsur kekuatan pada tingkat nasional dalam kehidupan politik tingkat lokal di Ambon. Dengan demikian ke-

Rumah (3267), Mobil (140), Sepeda Motor (109), Kios (565), Bank (2), Pasar (4), Toko (284), Bioskop (1), Hotel (3), Kantor Pemerintah (11), Gereja (11), Mesjid dan Langgar (19). (Sumber: Laporan Polda Maluku, 11 Maret 1999).

rusuhan massal antar-sukubangsa tersebut dilihat dapat terwujud karena adanya ketidakpastian hukum dan pedoman bagi rasa keadilan dan oleh situasi kota Ambon yang berpotensi konflik sosial, dan bukan karena perbedaan sukubangsa ataupun perbedaan agama yang dipunyai oleh masing-masing pelaku yang terlibat dalam konflik (lihat Suparlan, 1991a).

Dalam pendekatannya, kerusuhan Ambon diperlakukan sebagai konflik antara dua golongan yang masing-masing pelakunya menggunakan atribut sukubangsa dan keyakinan keagamaan untuk mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok konflik, dan bersama-sama dengan itu mengaktifkan stereotip dan *labelling* sebagai acuan jatidiri yang saling mereka pertentangkan. Berdasarkan jatidiri tersebut para pelaku dari masing-masing golongan mengambil posisi, mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok konflik, dan memainkan peran untuk saling menghancurkan. Dalam kondisi demikian, isu-isu kesukubangsaan dan keagamaan menjadi efektif untuk digunakan sebagai pembakar semangat oleh dan bagi para pelaku untuk saling menghancurkan.

Data mengenai kerusuhan Ambon dikumpulkan dengan menggunakan metode pengamatan dan wawancara.

Pengamatan terutama dilakukan terhadap akibat dari kerusuhan. Wawancara dilakukan dengan sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam kerusuhan Ambon. Wawancara dengan pelaku kerusuhan telah dilakukan secara terseleksi, dan wawancara dengan warga masyarakat kota Ambon dan sekitarnya dilakukan secara acak. Di samping itu, dalam penelitian ini juga dikumpulkan dan dikaji data tertulis atau dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. Sebagian data tertulis tidak dapat diperoleh, terutama data kependudukan dan kategori-kategori sosial yang ada dalam masyarakat kota Ambon, karena kantor-kantor pemerintah tutup, kecuali Kantor Gubernur dan Kepolisian.

Tulisan ini mencakup uraian mengenai latar belakang kota Ambon dan sekitarnya, kerusuhan massal yang terjadi dan upaya-upaya peredamannya, kesimpulan mengenai hakikat kerusuhan, dan rekomendasi. Latar belakang kerusuhan Ambon dan sekitarnya berisikan uraian mengenai konteks yang mengkondisikan konflik antar-sukubangsa dan antar keyakinan keagamaan, dan yang dengan mudah dapat diaktifkan dan digunakan oleh para pelaku atau provokator untuk memicu terjadinya keru-

suhan massal. Sedangkan mengenai kerusuhan dan peredamannya berisikan uraian mengenai coraknya, proses-proses terjadinya, kapan, di mana, dan mengapa bisa terjadi serta dampak-dampak yang diakibatkannya, serta berbagai bentuk peredaman kerusuhan yang telah dilakukan oleh pemda, polisi, TNI, dan masyarakat setempat.

LATAR BELAKANG KOTA AMBON

1. Gambaran Umum

Kota Ambon sebagai ibukota Propinsi Maluku mempunyai fungsi sentral dalam dan bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Propinsi Maluku. Sebagai ibukota propinsi, di satu pihak kota Ambon merupakan kepanjangan tangan sistem nasional yang berpusat di Jakarta dan di pihak lain merupakan puncak dari berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Maluku. Sebagai sebuah propinsi yang terbuka untuk semua warga negara Indonesia, kota Ambon juga mempunyai posisi sentral dalam berbagai percaturan sosial, ekonomi, dan politik dari masyarakat-masyarakat lokal dan propinsi-propinsi yang terletak di sekelilingnya, terutama Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Posisi sentral kota Ambon ini sejalan dengan model pemerintahan Orde Baru yang sentralistik, yang memungkinkan sistem politik nasional Jakarta secara langsung turut campur dalam berbagai kebijakan internal propinsi, kabupaten, kecamatan, dan bahkan desa. Antara lain dapat dilihat dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang pengaturan pemerintahan desa, yang sadar atau tidak sadar telah menghancurkan hak budaya komuniti dan pranata *pela gandong*, serta mengubah berbagai pola kebudayaan Ambon yang dalam tradisinya menekankan persatuan dan kemajemukan. Sehingga berbagai kebijakan pada tingkat propinsi lebih banyak ditentukan oleh selera politik dari oknum yang menguasai sistem nasional dengan "remote control" dari Jakarta, dan untuk kepentingan sistem nasional yang ada di Jakarta. Model kebijakan seperti ini dengan sendirinya tidak atau kurang mementingkan kepentingan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat propinsi setempat.

Sayangnya model kebijakan yang sentralistik tersebut tidak mungkin ditentang oleh masyarakat setempat untuk diubah menjadi berorientasi pada kepentingan propinsi setempat, karena pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan

atas kekuasaan yang didukung penuh oleh ABRI dan aparat pemerintah lainnya tidak mungkin bisa dikritik atau diubah oleh rakyat demi kepentingan rakyat. Apalagi, lemahnya mekanisme kontrol dari dalam sistem-sistem birokrasi itu sendiri terhadap kekuasaan yang dipunyai ABRI dan aparat pemerintahan nasional Indonesia, memungkinkan aparat kekuasaan tersebut berubah atau bergeser posisinya menjadi oknum. Oknum adalah pejabat atau aparat, yang dengan berbagai jabatan menggunakan kekuasaan yang dipunyai, yang sering kali kekuasaan tersebut berada di atas kekuasaan hukum formal, untuk kepentingan diri sendiri, kerabatnya, kelompoknya, atau golongannya. Oknum-oknum bermunculan dan menjadi kuat pada waktu pranata hukum formal tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana seharusnya.

Dalam keadaan seperti itu politik golongan menjadi corak yang dominan dalam kehidupan masyarakat kota Ambon dan sekitarnya, yaitu sebelum dan menjelang terjadinya kerusuhan, yang dilakukan oleh para pelakunya dengan cara-cara KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dalam suatu suasana kehidupan perkotaan yang penekanan ekonominya adalah pada jasa-jasa pelayanan, maka kemunculan preman-preman yang seolah-

olah berada di atas hukum hanya mungkin dapat terjadi bila ada oknum-oknum yang menjadi patron yang berfungsi sebagai pelindung atau beking mereka. Begitu juga berbagai bentuk pelanggaran undang-undang kependudukan, lingkungan, tertib sosial dan masyarakat, serta berbagai tradisi dan konvensi sosial hanya mungkin dapat terwujud bila ada oknum yang menjadi patron atau pelindung. Para oknum dan preman inilah yang secara aktual atau *de facto* menguasai dan menentukan patokan benar dan salah menurut hukum dan konvensi sosial yang berlaku di kota Ambon dan sekitarnya.

Keadilan yang ditafsirkan secara sepihak ini dapat dikatakan membebani dan merugikan warga masyarakat umum, yaitu mereka yang tidak termasuk golongan oknum dan preman yang berkuasa. Selanjutnya beban sosial, mental, dan ekonomi yang diderita karena ketidakadilan tersebut dapat mendorong dan membangkitkan perasaan frustrasi sosial, ketidaksukaan atau kebencian yang mendalam terhadap preman dan oknum, tanpa mereka itu berdaya untuk melampiaskan kebencian mereka (lihat Sarwono, 1999). Ketidakpuasan, keputusasaan, ketidakberdayaan, dan kebencian menjadi meruyak pada waktu mereka melihat kaitan hubungan an-

tara preman dan oknum di satu pihak dengan sistem politik pada tingkat lokal di Ambon dan Maluku; dan antara kesemuanya itu dengan sistem nasional, yang mereka rasakan sebagai memihak kepada kepentingan oknum dan preman yang berkuasa.

Ada dugaan bahwa kerusuhan Ambon tidak terlepas dari pengaruh pergeseran keseimbangan politik nasional yang terjadi saat pemerintahan Orde Baru menghasilkan golongan yang merasa terpuruk karena stigma non-Muslim (Boedhisantoso, 1999). Di lain pihak, dan pada saat yang sama, kerusuhan Ambon tidak terlepas dari pengaruh upaya-upaya golongan Muslim yang dominan pada tingkat nasional untuk mempertahankan dominasi kekuasaan politiknya pada tingkat lokal di Ambon dan Maluku. Kalau dicermati dengan sungguh-sungguh, berita-berita di media cetak dan elektronik sebenarnya telah menyajikan nuansa yang memihak kepada kepentingan golongan muslim Ambon. Berita-berita sering kali tidak benar, karena dibesar-besarkan atau dikecil-kecilkan sesuai dengan tujuan pemberitaan. Dua macam gejala pada tingkat nasional tersebut, secara langsung ataupun tidak langsung memperbesar jurang yang harus diseberangi untuk mendamaikan pihak-pihak yang saling bermusuhan di Ambon.

Dominannya politik golongan tersebut, kerap tanpa disadari oleh para pelakunya sendiri, sebenarnya didukung oleh keyakinan keagamaan yang ekstrem. Yaitu keyakinan keagamaan yang menekankan keagungan agama dan Tuhan-nya dan mengkafirkan agama dan Tuhan yang dipeluk oleh umat beragama lain. Akar permasalahan dari corak keagamaan seperti itu terletak pada penekanan atas pendidikan agama di sekolah dan perguruan tinggi yang mengagungkan agama yang dipeluknya. Sehingga, agama sebagai keyakinan, dengan mudah diaktifkan sebagai atribut oleh pelaku untuk acuan jatidiri yang dipertentangkan dengan jatidiri pihak lain; atau jatidiri yang mengkafirkan jatidiri pihak lain yang bukan kelompoknya. Hal demikian memungkinkan terwujudnya 'situasi demonik', sebagaimana dikemukakan oleh Tim Rujuk Sosial Konflik Ambon (Tim Rujuk 1999).

Menurut sejumlah informan, kota Ambon yang sampai dengan akhir tahun 1970-an atau permulaan tahun 1980-an dihuni oleh mayoritas penduduk asal Ambon dan pulau-pulau lain di Propinsi Maluku, sejak akhir tahun 1980-an berubah komposisi penduduknya menjadi dihuni secara mayoritas oleh penduduk asal Bugis, Buton, dan Makassar

(BBM) dari Ujung Pandang dan sekitarnya. Karena penduduk kota Ambon asal BBM ini beragama Islam, maka jumlah pemeluk agama Islam juga meningkat dari yang semula minoritas menjadi hampir menyamai jumlah penduduk yang beragama Kristen.

Sayangnya data paling akhir mengenai kependudukan kota Ambon tidak dapat diperoleh selama penelitian berlangsung. Sedangkan data kependudukan yang ada adalah Data Kependudukan Kotamadya Ambon 1997, sebagai berikut:

Islam	132.215 jiwa	42,38%
Kristen	161.977 jiwa	51,92%
Katolik	17.315 jiwa	5,36%
Lainnya	797 jiwa	0,25%

Sedangkan golongan pemeluk agama penduduk Propinsi Maluku seluruhnya berjumlah 2.088.516 jiwa, yang rinciannya adalah:

Islam	1.232.433 jiwa	59,01%
Kristen	737.037 jiwa	5,29%
Katolik	108.394 jiwa	5,19%
Lainnya	10.651 jiwa	0,51%

Secara tradisional penduduk Ambon terbagi atas dua golongan utama, yaitu yang beragama Islam dan yang beragama Kristen. Karena jumlah yang beragama Katolik tidak seberapa dibandingkan yang beragama Islam dan Kristen, maka dalam pertentangan Islam dan Kristen, mereka yang

beragama Katolik seringkali tidak atau kurang diperhitungkan. Penganut Islam dan Kristen masing-masing terdiri atas aliran-aliran dari yang moderat sampai dengan yang fanatik berkenaan dengan keyakinan keagamaan dan hubungannya dengan agama-agama lainnya. Gereja Katolik dalam berbagai konflik mengambil posisi moderat dibandingkan dengan sejumlah kelompok yang beraliran keras dan ekstrem dari gereja Protestan dan umat Islam.

Di daerah pedesaan, warga yang menganut agama yang sama cenderung untuk hidup mengelompok. Sehingga ada desa-desa yang homogen Islam dan homogen Kristen. Dalam desa-desa yang warganya beragama Kristen dan Islam, masing-masing pemeluk agama tersebut hidup mengelompok di antara sesama mereka sendiri. Sehingga dalam sebuah desa yang mayoritas beragama Kristen, terdapat bagian minoritas desa yang warganya homogen Islam. Atau sebaliknya.

Sedangkan di kota Ambon pola pengelompokan kesatuan hidup berdasarkan keyakinan keagamaan seperti yang terjadi di daerah pedesaan memang ada, yaitu adanya kampung-kampung yang mayoritas penduduknya beragama Kristen (Kudamati) atau Islam (Batu Merah). Sedangkan penduduk kampung minoritas

bisa hidup mengelompok dalam satuan kehidupan dan bisa pula terpencar-pencar secara individual, karena lahan yang tersedia di kampung yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk membangun sebuah perkampungan umat yang seagama.

Secara garis besarnya, desa-desa di Ambon dibagi dalam dua wilayah, yaitu desa-desa pantai utara di Jazirah Leihitu yang beragama Islam dan desa-desa di Jazirah Leitimor yang beragama Kristen. Pusat kebudayaan Islam di Ambon adalah di Hitu, yang merupakan pemukiman tua dengan tradisi-tradisi Islam yang berorientasi ke Jepara dan Gresik sebelum abad ke-20. Sedangkan pusat kebudayaan Kristen di Ambon adalah beberapa kampung tua di kota Ambon dan di Soya yang terletak di pinggiran kota Ambon. Bahkan desa Soya, yang terletak di dataran tinggi di pinggir kota Ambon, mempunyai mitologi yang mengacu kepada kerajaan Majapahit.

Warga di desa-desa Ambon bagian selatan yang beragama Islam pada umumnya adalah para petani keturunan orang Buton, yang nenek moyangnya telah datang dan bermukim di desa-desa tersebut. Orang-orang Buton ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Mereka ini hidup

saling menolong dengan sesama warga desa yang Orang Ambon, dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Sebagian dari mereka terikat dalam hubungan *pela* dengan sesama warga asal desa Ambon setempat.

2. Demografi Sosial Kota Ambon

Hingga sebelum meletusnya peristiwa 19 Januari 1999 yang memicu kerusuhan yang menyebabkan diserangnya warga kota Ambon asal BBM dan dihancurkannya segala harta milik mereka sehingga harus mengungsi ke tempat penampungan atau pulang kampung, orang asal BBM di kota Ambon adalah mayoritas dan dominan (sayangnya tidak ada data sensus mengenai hal ini, keterangan hanya diperoleh dari wawancara dengan informan dan juga dari tulisan Riwanto, 1999).

Secara demografi sosial, dengan mengikuti model 'hipotesa kebudayaan dominan' dari Prof. Bruner (1974), orang-orang BBM di kota Ambon adalah dominan. Dari sudut kependudukan, mereka ini mayoritas dibandingkan penduduk asal Ambon setempat. Secara sosial, ekonomi, dan budaya mereka menguasai tempat-tempat umum dan pasar di mana warga masyarakat asal setempat hanya

menjadi konsumen dan pengguna jasa; dan secara politik lokal dan nasional mereka menguasai berbagai kebijakan penguasaan dan pendistribusian sumber-sumber daya yang ada di Ambon dan Maluku.

Gejala seperti ini telah diamati Bruner (1974) di Bandung pada tahun 1970, di mana Orang Jawa dengan jumlah penduduk migrannya yang besar dan kemampuan sumber daya manusianya dirasakan sebagai menantang keberadaan dan dominasi kebudayaan Sunda. Dalam perspektif Orang Sunda, kota Bandung adalah pusat kebudayaan Sunda. Dalam pengertian ini, para migran di Bandung seharusnya tunduk dan mengikuti berbagai bentuk aturan menurut kebudayaan Sunda, dan bukannya orang Sunda di Bandung yang harus mengikuti berbagai bentuk aturan kebudayaan pendatang di Bandung. Sebagai jawabannya, Orang Sunda di Bandung mendirikan berbagai bentuk perkumpulan yang menjadi wadah bagi upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan kesenian Sunda, serta penguatan kesukubangsaan Sunda dalam berbagai bentuk solidaritas untuk penguasaan atas sumber-sumber daya di pranata-pranata pemerintahan dan kegiatan politik.

Walaupun apa yang terjadi di Bandung tahun 1970 sama dengan yang terjadi di

Ambon tahun 1999, tetapi ada perbedaan mendasar dari kedua gejala tersebut. Karena perbedaan ini maka di kota Bandung tidak sampai terjadi kerusuhan anti-Jawa, sedangkan di Ambon muncul dan berkembang kerusuhan anti-BBM. Perbedaan mendasar tersebut disebabkan oleh ada atau tidak adanya peranan para preman (yaitu para pendatang yang berlaku sewenang-wenang) terhadap penduduk setempat dengan beking dari oknum, sehingga berkembang perasaan tertekan yang mendalam dan merata secara sosial karena diperlakukan secara tidak adil, kasar dan sewenang-wenang tanpa bisa menolaknya. Di Bandung perasaan tertekan yang mendalam seperti yang terjadi di Ambon tidak terjadi, dan begitu juga tidak ada preman-preman Jawa, serta oknum-oknum asal Jawa yang menjadi acuan bagi kesewenang-wenangan tindakan mereka terhadap Orang Sunda.

Sebaliknya di kota Ambon unsur-unsur tersebut ada dan dirasakan dalam kehidupan Orang Ambon setempat. Adanya batas-batas sosial dan budaya antara Ambon dan BBM tersebut, dari interpretasi saya berdasarkan wawancara dengan para informan, menjadi nampak jelas dan tidak mudah terseberangi terutama antara BBM pendatang baru dengan warga kota Ambon yang ber-

agama Kristen. Sedang antara BBM dengan warga Ambon Islam, batas-batas sosial dan budaya di antara mereka nampak ada sebagai batas-batas sukubangsa, tetapi mereka masih dapat saling menyeberangi batas-batas sukubangsa tersebut karena keyakinan agama yang sama.

Bersamaan dengan keberadaan BBM yang dominan tersebut, berkembang dan mantap pula stereotip sukubangsa yang dikembangkan oleh pihak yang dominan dan diterima oleh yang minoritas, yaitu bahwa "Orang Ambon itu pemalas, hanya menghabiskan uang dan waktunya untuk minum-minum sampai mabuk, gengsi tinggi dan tidak mau kerja kasar (tidak mau berjualan, apalagi berjualan di kaki lima, tidak mau menjadi tukang sapu jalan, tidak mau menjadi kuli pengangkut barang, tidak mau menjadi tukang becak), maunya menjadi pegawai negeri atau ABRI walau gaji kecil tapi gengsi tinggi". Sebaliknya "Orang BBM adalah pekerja keras dan rajin, mau mengerjakan apa saja, dan merekalah yang telah membangun kota Ambon." Tetapi Orang Ambon juga mempunyai stereotip mengenai Orang BBM yaitu "preman dan mafia."

Stereotip yang ada dan praktek-praktek KKN serta berbagai bentuk kekerasan dan kesewenang-wenangan dari

para preman yang memperoleh beking para oknum, telah membuat rasa tidak aman menjadi merata dan menyeluruh pada warga kota Ambon. Ketidakpuasan warga Ambon telah menyebabkan terjadinya perkeltahan di antara pemuda dari kampung-kampung penduduk asli Ambon versus BBM, dan konflik antar-sukubangsa ini terselimuti oleh isu konflik agama antara Orang Kristen dengan Orang Islam. Sehingga, sebelum terjadinya kerusuhan, suasana cukup mencekam telah terasa dalam kehidupan masyarakat kota Ambon. Kota Ambon sebagai pusat pemerintahan, pusat kebudayaan Maluku, kegiatan ekonomi, sosial, dan politik, telah menyebabkan bahwa apa yang terjadi di sana juga menular ke berbagai pelosok masyarakat di Propinsi Maluku.

3. Tradisi dan Perubahan

Masyarakat Ambon dan pulau-pulau di sekitarnya telah berabad-abad lamanya memegang tradisi kemajemukan dalam menata kehidupan mereka (Lokollo 1997, Pattikayhatu 1997, Unepatty 1996). Perbedaan, konflik, dan kerjasama adalah bagian dari tradisi mereka yang menekankan pentingnya persatuan, yaitu persatuan berdasarkan atas hubungan genealogi atau hubungan darah. Hubungan darah yang nyata dan

berdasarkan atas sistem kekerabatan maupun hubungan darah yang fiktif terwujud melalui upacara pengangkatan saudara atau *pela*.

Dalam tradisi tersebut, perbedaan-perbedaan di antara sesama mereka, terutama perbedaan keyakinan agama, telah dan mampu dijumpai oleh penggunaan idiom saudara sedarah atau saudara sekandung (*pela gandong*), dan diakomodasi oleh berbagai bentuk *pela* lainnya. Secara tradisional sebuah masyarakat desa yang merupakan sebuah satuan genealogi, setidaknya mempunyai hubungan *pela* dengan sebuah masyarakat desa lainnya. Semakin banyak sebuah masyarakat desa mempunyai hubungan *pela* dengan desa-desa lain maka akan semakin mantaplah kehidupan masyarakat desa tersebut, dan semakin terhindarlah mereka dari berbagai serangan yang dilakukan oleh desa-desa lainnya yang tidak menjadi pasangan *pelanya*. Karena masyarakat desa yang saling mempunyai hubungan *pela* tidak akan saling menyerang, bahkan sebaliknya akan saling membantu, saling melindungi satu sama lain dalam keadaan sulit atau bila diserang oleh desa lainnya (lihat Bartels, 1977, Lokollo dkk, 1997).

Dalam tradisi tersebut, sebuah desa atau negeri adalah sebuah masyarakat lokal atau

komuniti yang otonom. Masing-masing mempunyai hak budayanya sendiri, yaitu sebuah hak untuk mengatur kehidupan dengan berpedoman pada kebudayaan (adat) dan keyakinan keagamaan mereka masing-masing. Pengaturan secara budaya bukan hanya mencakup hak dan kewajiban warga desa atau negeri, tetapi juga mencakup hak-hak kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan atas lingkungan desa beserta isinya (hutan, sungai, semak belukar, dan tanah beserta isinya). Di antara berbagai pengaturan hak dan kewajiban menurut kebudayaan tersebut, yang kemudian secara nasional menjadi terkenal adalah tradisi *sasi*.

Di masa lampau, seorang kepala desa atau raja diangkat dari warga terbaik klen-klen atau fam-fam pendiri desa tersebut (Bartels 1977, Unapatty 1996). Kepala desa atau raja adalah juga seorang kepala adat yang tugasnya adalah agar berbagai aturan yang teradatkan itu dijalankan oleh warga desa sebagaimana seharusnya. Di masa sekarang bilamana seorang kepala desa itu dipilih, belum tentu dia juga berfungsi sebagai kepala adat, sebab kebijakan Orde Baru jabatan kepala adat dipisahkan dari jabatan kepala desa.

Akibat dari adanya pemisahan jabatan tersebut adalah bahwa kewenangan kepala

desa mengacu pada kekuatan atau kekuasaan pemerintah, sedangkan kewenangan kepala adat mengacu pada tradisi-tradisi budaya yang telah turun-temurun teradatkan dan berlaku dalam masyarakat setempat. Menurut para informan, kewenangan kepala desa menjadi jauh lebih kuat daripada kewenangan kepala adat, karena kemampuan memaksakan sesuatu kebijakan yang dibuat oleh kepala desa dapat dilakukan secara nyata. Sedangkan kemampuan kepala adat untuk memaksakan suatu kebijakan menjadi terbatas dan samar-samar karena acuan kewenangannya adalah "sanksi-sanksi gaib" yang tidak atau belum pasti efektif.

Dampaknya lebih lanjut adalah bahwa berbagai upacara berkenaan dengan ikatan-ikatan *pela* di antara kelompok klen dan di antara masyarakat desa dengan masyarakat desa lainnya menjadi diabaikan. Sehingga, menurut para informan, generasi muda Ambon masa kini tidak lagi mengenal *pela* dan tidak lagi menghargai pentingnya *pela* dalam dan bagi kehidupan mereka.

4. Potensi-potensi Konflik

Secara tradisional, konflik antara satu klen dengan klen lain dan antara satu masyarakat desa dengan masyarakat desa lainnya selalu terjadi. Konflik-

konflik tersebut biasanya dapat diselesaikan atau didamaikan melalui berbagai aturan yang ada dalam pranata-pranata masyarakat tersebut, dan biasanya selalu ada pihak ketiga yang dihormati oleh pihak-pihak yang saling konflik untuk mendamaikannya.

Di masa lampau konflik-konflik terjadi terutama karena persengketaan tanah (sebagaimana telah disinggung di atas dalam tulisan ini) atau karena urusan rumah-tangga dan keluarga, masalah tenung-meneung dan keagamaan asli mereka. Pada masa sekarang sumber-sumber konflik menjadi meluas, yang mencakup ketersinggungan gengsi dan jatidiri atau kehormatan diri yang acuannya adalah kepentingan politik dan ekonomi serta keyakinan keagamaan.

Di antara sumber-sumber konflik yang berkaitan dengan ketersinggungan jatidiri adalah,

- (1) Penajaman batas-batas sosial dan budaya karena peraturan SKB 3 Menteri, dan diberlakukan secara efektif oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) Ambon, berkenaan dengan upacara hari raya keagamaan. Di masa lampau, perbedaan keyakinan keagamaan di antara mereka yang masih bersaudara atau di antara mereka yang menjadi warga masyarakat desa yang sama tidaklah menjadi ma-

salah. Karena bagi mereka Tuhan Yang Maha Besar dan Yang Esa atau *Kabasa Elake* (Unepatty 1996: 45-46), adalah Tuhan bagi semua agama yang ada di muka bumi. Masing-masing warga masyarakat desa atau kaum kerabat yang berbeda keyakinan keagamaannya tersebut saling menolong dalam berbagai upacara, keagamaan, bahkan dalam mendirikan atau memperbaiki rumah-rumah ibadah. Disadari atau tidak, mereka yang semula merasa sesaudara, sekarang menjadi saling mengkafirkan satu sama lain.

(2) Penajaman batas-batas sosial dan budaya karena politik kesukubangsaan dan keagamaan pada tingkat propinsi juga membawa dampaknya pada kehidupan lokal masyarakat desa ataupun di antara anggota-anggota kelompok kerabat. Label BBM yang diidentikkan dengan Islam dipertentangkan dengan dengan label Ambon yang Kristen. Pada waktu BBM dan Ambon dihilangkan atau dilebur, maka yang dipertentangkan adalah label Islam lawan label Kristen. Masjid dan gereja mereka lihat dan perlakukan sebagai simbol jatidiri dan kehormatan mereka masing-masing.

(3) Perasaan sebagai "kita" yang dipertentangkan dengan "mereka", antara Ambon lawan BBM, makin dipertajam lagi oleh kondisi kota Ambon yang secara ekonomi, sosial dan politik dirasakan sebagai didominasi oleh orang-orang BBM. Lebih lanjut, dampak dari penggolongan BBM yang sebenarnya berlaku untuk orang Buton, Bugis, dan Makassar yang merupakan migran baru ke kota Ambon dan yang hidup dalam bidang jasa, telah mencakup juga golongan Orang Buton yang telah beberapa generasi hidup di daerah pedesaan. Orang-orang Buton di daerah pedesaan yang telah dianggap sebagai saudara oleh Orang Ambon di desa bersangkutan, akhirnya ikut digolongkan juga sebagai lawan dari Orang Ambon.

(4) Aparat keamanan dan pemerintahan Ambon, oleh karena adanya *krismon* dan *krisek*, cenderung berubah menjadi oknum-oknum yang bersedia memberikan fasilitas untuk sejumlah imbalan, atau oknum-oknum yang membeking preman atau berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis yang melanggar hukum. Oknum-oknum ini punya kemampuan untuk memani-

pulasi (atau melanggar) hukum yang berlaku untuk kepentingan pribadi, kerabat, golongan, dan kelompok sukubangsa atau keyakinan keagamaan. Kesemuanya ini mendorong terciptanya suasana ketidakpuasan, dan munculnya keinginan untuk mengakhiri semua itu agar tercipta keadilan dan rasa aman dan sejahtera bagi semua seperti kehidupan di masa lampau.

- (5) Secara umum terdapat suasana ketidakpastian hukum, sehingga perasaan diperlakukan tidak adil menjadi berkembang secara meluas, baik pada orang BBM maupun pada Orang Ambon, baik pada Orang Islam maupun Orang Kristen. Kesukubangsaan dan keyakinan keagamaan masing-masing menjadi diperkuat, karena rasa aman hanya dapat diperoleh dalam lingkungan sukubangsanya sendiri atau dalam lingkungan kelompok agamanya, yaitu di dalam lingkungan yang bercorak primordial.

KERUSUHAN DAN PEREDAMANNYA

1. Suasana Mencekam

Kota Ambon setelah terjadinya kerusuhan ditandai oleh mencoloknya tumpukan puing

yang berserakan di mana-mana, bekas-bekas kebakaran serta rumah-rumah kosong. Di beberapa daerah pedesaan suasana ini juga terasa, karena adanya bekas-bekas terbakarnya rumah dan bangunan gedung (sekolah, masjid, gereja). Jalan-jalan di kota Ambon dan sekitarnya diblokir dengan batu, balok kayu, ban bekas, dan bangkai mobil. Jalan-jalan di kota Ambon terasa sepi dari lalu-lintas kendaraan dan orang. Di mulut-mulut gang atau jalan bergerombol pemuda (posko keamanan) dengan membawa benda-benda tajam: parang, busur dan panah, tombak, dan di sana-sini nampak bergerombol aparat keamanan berjaga-jaga. Hanya ada satu-dua toko atau kios yang buka di kota Ambon, sedangkan pasar darurat yang didirikan oleh Pemda kosong karena tidak berfungsi. Pasar-pasar kaget atau kaki lima, muncul pada pagi hari di daerah-daerah yang dirasakan aman karena adanya penjagaan aparat keamanan. Pedagang-pedagang tersebut bukan lagi orang-orang BBM, tetapi orang Ambon. Kebutuhan sehari-hari relatif masih mencukupi, begitu juga persediaan bensin.

Sewaktu-waktu, bila terdengar suara tembakan atau ledakan bom, warga masyarakat yang ada di jalan segera tiarap bersembunyi, dan sua-

sana kota Ambon menjadi betul-betul seperti kota mati. Dari hari ke hari, hampir setiap malam atau pada waktu fajar menyingsing menjelang pagi terdengar suara tembakan atau bom. Hampir setiap hari mulai dari tanggal 8 Maret hingga 11 Maret 1999 terlihat asap mengepul di bagian-bagian yang berbeda dari kota Ambon karena adanya rumah-rumah yang dibakar. Sekolah dan perguruan tinggi diliburkan, kantor-kantor walaupun dibuka tetapi tidak ada stafnya (lumpuh).

Menurut keterangan informan dan dari hasil pengamatan, bila suasana kota Ambon dirasakan aman maka ada guru yang datang ke sekolah, tetapi muridnya tidak ada. Atau sebaliknya, bila ada muridnya, giliran gurunya yang tidak ada. Pengangkutan warga sipil di dalam kota atau antara kota Ambon dengan desa-desa sekelilingnya pulang-pergi selalu dikawal oleh aparat keamanan (polisi atau militer). Pengawasan oleh aparat berseragam dan bersenjata itu diperlukan, karena posko-posko yang terdiri atas para pemuda setiap saat akan melakukan *sweeping*: menghentikan warga sipil yang bepergian, memeriksa KTP, dan bila agama yang tercantum di KTP berbeda dengan agama dari para pemuda di posko itu, maka si warga sipil yang akan bepergian itu akan dianiaya

dan dibunuh. Di beberapa desa sekeliling kota Ambon yang relatif aman, sekolah-sekolah tetap dibuka sebagaimana biasa.

Jumlah aparat (Marinir dan Angkatan Darat) bertambah terus dari hari ke hari. Pada 11 Maret 1999 dilaksanakan serah terima jabatan Kapolda Maluku, dan sekaligus juga penyerahan Kodal dan Polda ke Korem. Setelah dilaksanakannya penyerahan Kodal ke Korem tersebut, kota Ambon langsung terasa aman. Tidak lagi terdengar suara-suara tembakan ataupun terlihat asap mengepul. Keadaan aman ini berlangsung terus sampai Tim Ahli meninggalkan Ambon pada tanggal 14 Maret 1999.

2. Bentuk-bentuk Kerusuhan

Kerusuhan Ambon terwujud dalam bentuk perkelahian massal dan penyerbuan massal dengan menggunakan senjata tajam, senjata api rakitan, bom rakitan, atas sasaran-sasaran yang nampaknya telah mereka tetapkan sebelumnya. Perkelahian ataupun penyerbuan massal hampir dapat dikatakan seperti perang primitif atau sama dengan penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh para prajurit Orang Dani di daerah pegunungan Jayawijaya, Irian Jaya, ke desa-desa untuk menjarah dan menghancurkan

desa-desa tersebut. Sama dengan prajurit Dani, para pemuda dan warga kota Ambon yang terlibat dalam kerusuhan tersebut bersenjatakan tombak, panah, dan parang. Di samping perkelahian massal dan penyerbuan massal, juga terjadi pembakaran atas harta benda dan rumah, serta sejumlah tempat ibadah.

Terjadinya perkelahian atau penyerbuan massal selalu didahului oleh adanya anggota salah satu pihak yang mati teraniaya (ditembak ataupun terbacok parang) yang diduga keras dilakukan oleh pihak lain. Atau, dimulai dengan adanya ledakan bom dan tembakan, yang kemudian masing-masing kelompok yang saling bertentangan itu mengorganisir diri dan siap melakukan penyerangan atau perkelahian. Perkelahian yang terjadi di satu wilayah di kota Ambon segera menyebar ke hampir seluruh Pulau Ambon. Dan, di desa-desa di luar kota Ambon para warganya masing-masing lalu siap-siaga untuk berperang, menyerbu ke kota Ambon atau memblokir jalan-jalan yang melewati desa mereka.

Terdapat kecenderungan adanya penyerangan yang dilakukan oleh kelompok yang berasal dari luar desa dan yang bukan menjadi pasangan pelanya. Sedangkan sesama warga desa yang terletak di luar kota Ambon berupaya

saling melindungi. Mereka yang Ambon dan beragama Kristen melindungi mereka yang Buton, Bugis, atau Makassar yang Islam, pada waktu warga desa lain menyerbu untuk membantai warga BBM tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh warga BBM yang Islam dalam menghadapi penyerang desa lain yang beragama Islam dan berupaya akan membantai warga Ambon yang Kristen.

Bila upaya perlindungan tidak berhasil maka warga yang menjadi sasaran penyerangan tersebut diungsikan ke tempat yang lebih aman, seperti yang terjadi dengan warga Buton dari desa Batu Meja yang diungsikan dengan kawalan penduduk setempat ke kantor Polda Maluku.

3. Isu-isu Sentral

Isu sentral dalam kerusuhan adalah anti atau penghancuran BBM oleh warga Ambon. Bahkan orang Buton yang tinggal di daerah pedesaan juga diserbu oleh orang Ambon yang bukan warga desa yang bersangkutan untuk dihancurkan. Isu sentral anti-BBM menjadi terselimiuti oleh isu konflik antar-agama Islam dan Kristen, karena BBM adalah Islam dan yang menyerang warga BBM adalah Ambon yang Kristen. Perluasan dari isu Islam vs Kristen, ter-

wujud menjadi upaya saling menghancurkan segala sesuatu yang berjatidiri dan bercirikan simbol-simbol Islam atau Kristen. Sehingga Orang Padang (Islam) berikuk rumah-rumah makan mereka pun termasuk dalam sasaran penghancuran. Walaupun konflik yang nampak di permukaan adalah antara kelompok Islam dan Kristen, tetapi simbol-simbol yang digunakan untuk menunjukkan jatidiri masing-masing bukan simbol-simbol agama. Sebab mereka yang tergolong Islam menggunakan ikat kepala putih dan yang Kristen menggunakan ikat kepala merah.

Orang Cina di kota Ambon tidak dimasukkan dalam skenario konflik atau kerusuhan yang terjadi. Tidak ada satu pun dari ruko atau toko mereka yang dibakar atau dihancurkan. Isu kesenjangan sosial sebagai sebab utama untuk menjelaskan kerusuhan yang terjadi di Ambon, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar di media massa cetak dan elektronik menjadi tidak relevan alias tidak betul, sebagaimana kekeliruan yang telah dilakukan oleh para pakar melalui media elektronik itu dalam menjelaskan sebab-sebab kerusuhan Sambas di Kalimantan Barat.

Berkembang pula isu bahwa kerusuhan di Ambon didalangi oleh para politisi dan preman di Jakarta. Waktu pe-

nelitian ini amat sangat terbatas, sehingga tidak berkesempatan untuk menelusuri isu tersebut secara mendalam. Di antara isu yang berkembang adalah kebangkitan Masyumi dan RMS. Penelitian ini tidak mampu untuk menemukan adanya bukti-bukti kebangkitan Masyumi ataupun RMS dalam kerusuhan Ambon.

Isu lainnya adalah adanya provokator yang mem-bakar semangat para perusuh. Para provokator yang ditangkap sebetulnya adalah para partisan yang juga menjadi korban isu dibakarnya Masjid Al Fatah (simbol sentral dan signifikan dari Umat Islam di Ambon dan Maluku) ataupun korban isu-isu lainnya. Mereka ini sebenarnya tidak dapat dinamakan provokator, dan walaupun ingin digolongkan sebagai provokator mereka adalah provokator kelas teri.

Ada isu yang berkembang, isinya menyatakan bahwa Pemda didominasi oleh orang-orang Ujung Pandang (BBM) yang Islam. Dari berbagai informasi yang diperoleh, ada usulan untuk menyelesaikan kerusuhan dengan cepat, yaitu: "Bila Gubernur bersedia untuk mengangkat seorang Ambon yang Kristen sebagai sekwilda, yang Ambon dan Kristen maka kemajemukan Maluku tercermin, dan kepentingan-kepentingan kemajemukan terwakili di dalam pemerintahan."

Baik mereka yang Islam maupun yang Kristen menganggap bahwa aparat keamanan (Polisi, dan Angkatan Darat/Kostrad) memihak pada lawan masing-masing. Mereka mencurigai bahwa sumber segala kerusuhan tersebut adalah aparat itu sendiri. Mereka dapat menunjukkan bukti-bukti penembakan-penembakan yang dilakukan aparat keamanan. Mereka juga merasa bahwa aparat pemerintah (Pemda) tidak mampu untuk dengan cepat membantu mereka yang menjadi korban dan tidak mampu mengatasi kerusuhan berikut dampak-dampaknya. Isu ini memantapkan rasa tidak aman dan rasa ketidakadilan yang sebelumnya telah mengkristalkan munculnya kerusuhan, sehingga berkembang suatu kesadaran umum bahwa masing-masing adalah untuk dirinya sendiri, dan menghancurkan lawan adalah pilihan terbaik untuk tetap dapat hidup.

5. Polisi, Aparat Keamanan, dan Upaya Peredaman Kerusuhan

Ada tiga kebijakan penanganan kerusuhan yang kami catat, yang dilakukan oleh Polda Maluku dan Polres Ambon. Pertama, anggota-anggota Polda yang tinggalnya di pemukiman biasa ditugaskan untuk secara aktif meredam konflik yang

terjadi di wilayah masing-masing. Kedua, peningkatan patroli kota oleh Polres kota Ambon. Ketiga, Polres membentuk empat buah sektor pengamanan (A, B, C, D), yang masing-masing sektor membentuk pos-pos penjagaan yang mengawasi dan menjaga daerah perbatasan wilayah Kristen dan wilayah Islam agar tidak terjadi konflik di antara keduanya.

Dari informasi yang kami dapatkan melalui wawancara dengan para petugas yang bersangkutan, terdapat kesan bahwa butir no. 1, tidak betul-betul dijalankan oleh petugas Polda di pemukiman. Tugas kepolisian di pemukiman memang tidak mudah, khususnya meredam semangat menghancurkan dari warga yang sudah mantap terbentuk oleh kondisi kota Ambon pada waktu itu. Mungkin hanya Kapten Matahelumual SH dari Rumah Tiga/Poka dan Kapten D. Soplanit, SH dari desa Batu Meja yang betul-betul menjalankan tugas tersebut, meskipun setelah itu juga diikuti oleh beberapa perwira lainnya.

Sedangkan kegiatan-kegiatan para petugas Polres dan Sektor Pengamanan lebih bersifat reaktif atau menunggu terjadinya konflik. Sebagai pengamanan, Sektor Pengamanan secara relatif telah mampu meredam konflik-konflik yang terjadi, seperti kejadian di daerah Kudamatl pada tanggal

9 Maret 1999. Bahkan kerja tim dari Sektor Pengamanan (satuan polisi dan marinir di bawah komando pelaksana pe-tugas polisi) telah dapat berjalan dengan baik. Walau demikian, seharusnya Polres dan Sektor Pengamanan dilengkapi dengan Satuan Penerangan ataupun Satuan Kegiatan Sosial lainnya untuk mengambil sim-pati masyarakat yang ber-konflik dan memberikan penyul-han dan bimbingan demi meng-hentikan konflik yang terjadi.

Terkésan adanya hu-bungan kerja yang kurang har-monis di dalam Tim Penga-manan, terutama antara polisi dengan Angkatan Darat. Mung-kin karena prinsip polisi yang menekankan diskresi tidak cocok dengan prinsip disiplin dan taat pada perintah atasan yang memimpin kesatuan TNI AD di lapangan. Begitu juga adanya oknum-oknum yang me-mihak pada kelompok-kelom-pok yang sedang bermusuhan telah menyebabkan kurang efektifnya kerja aparat dalam upaya meredam kerusuhan. Setelah diserahterimaknya Kodal kepada Korem oleh Polda situasi langsung aman, se-hingga kegiatan-kegiatan Sektor Pengamanan dan patroli-patroli oleh Polres menjadi tidak rele-van lagi. Pada tanggal 11 Maret 1999 diadakan pertemuan di antara para tokoh pemuda, preman, dan jawara dari kedua

pihak yang bertikai untuk menciptakan perdamaian.

6. Upaya-Upaya Pemda

Menanggapi kerusuhan Ambon, Gubernur mengumpulkan para tokoh masyarakat dan pemuda untuk merundingkan cara-cara penyelesaian kerusuhan. Pada tanggal 27 Februari 1999, di-buat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh para tokoh adat dan masyarakat setempat serta para tokoh pemuda se-Kotamadya Dati II Ambon, Pu-lau Ambon, Pulau Haruku, Pu-lau Saparua, dan Pulau Nusa-laut yang termasuk kabupaten Dati II Maluku Tengah.³ Pernyataan bersama tersebut ternyata gagal dilaksanakan.

Gubernur membentuk Tim Enam atau Tim Rujuk Sosial yang terdiri dari para pakar dan tokoh-tokoh agama untuk menjadi juru damai. Gu-bernur juga membentuk Posko Kerukunan Sosial yang ber-pusat di Kantor Gubernur. Juga dibentuk posko-posko di Masjid

³ Pertemuan dengan para tokoh masyarakat (Para Latupati, Saniri Negeri, Lurah, dan Tokoh Pemuda se-Kotamadya Dati II Ambon, Serta Pulau Ambon, Pulau Haruku, Pulau Saparua dan Pulau Nusa Laut Kabupaten Dati II Maluku Tengah), diselenggarakan pada tanggal 27 Februari 1999, yang dihadiri oleh 128 orang. Pertemuan tersebut telah menghasilkan keputusan-keputusan yang intinya setuju untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung antara kelompok-kelompok Kristen dan Islam

Al Fatah dan di Gereja Maranatha untuk menetralkan gejolak-gejolak konflik dari masing-masing pihak. Sayangnya posko-posko tersebut justru menjadi pendorong semangat konflik dan kerusuhan. Sehingga pada tanggal 9 Maret semua posko tersebut dipindahkan ke Korem.

Gubernur juga mengundang para tokoh pemuda, masyarakat, dan agama agar mereka mau berjanji untuk menciptakan perdamaian. Pemda akan mengupayakan diadakannya upacara adat, upacara *pela*, untuk menciptakan perdamaian secara adat. Sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan oleh gubernur dan Pemda selalu tidak efektif. Hasilnya sama dengan yang dilakukan oleh Polisi. Hambatan utama adalah minimnya pembiayaan dan keahlian serta tenaga pelaksana yang handal di lapangan.

Upaya lainnya yang dilakukan Pemda adalah membantu meringankan beban para pengungsi. Upaya ini juga belum sepenuhnya efektif karena berbagai faktor, dan terutama adalah faktor kejiwaan dari para pengungsi sendiri. Upaya mentransmigrasikan para korban kerusuhan nampaknya masih belum mendapat dukungan dari para pengungsi yang menjadi calon transmigran itu sendiri.

Pada tanggal 4-5 Maret 1999, Gubernur memimpin diskusi mengenai langkah-

langkah yang akan dan harus dilakukan oleh Tim Rujuk Sosial guna menuntaskan kerusuhan yang sudah demikian merugikan. Dalam rekomendasinya antara lain disebutkan bahwa adat perlu dipelajari kembali dan diaktifkan untuk dijadikan pedoman dalam menciptakan keteraturan sosial.

Berkenaan dengan isu terjadinya pembunuhan umat Islam di masjid oleh oknum polisi, yang sempat menjadi isu nasional, karena disampaikan oleh Kakanwil dan Ketua MUI Maluku kepada Menteri Agama dan oleh Menteri Agama disampaikan kepada Presiden Habibie, Gubernur Maluku membuat pernyataan yang menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu, tidak benar bahwa ada umat Islam yang dibunuh di masjid, dan tidak benar pula bahwa yang membunuhnya adalah oknum polisi. Sayangnya Presiden Habibie maupun Menteri Agama (kala itu) tidak mengoreksi pernyataannya, sehingga semangat jihad umat Islam di Jakarta dan sekitarnya makin menggebu.

Gubernur dan Pemda Tingkat II Maluku telah membuat sebuah program Kegiatan Peningkatan Keamanan yang sejalan dengan tindakan pengamanan yang dilakukan oleh Kodal setelah diambil alih Korem. Dalam program ini antara lain yang patut dikemukakan adalah kegiatan razia

atau *sweeping* senjata dan pendekatan kepada para jawara atau *jiroku*.

7. Upaya-Upaya Masyarakat

Pada dasarnya warga masyarakat Ambon dan sekitarnya tidak menghendaki terjadinya kerusuhan yang setiap saat memakan jiwa, serta menghancurkan harta benda. Dalam keadaan sadar akan keberadaan mereka sebagai warga masyarakat, mereka mengupayakan penjagaan atas rumah sendiri dan rumah tetangga, serta keamanan komunitas kampung mereka masing-masing. Mereka berjaga-jaga karena sadar bahwa setiap saat mereka dapat saja diserang oleh pihak lain.

Mereka juga menduga keras bahwa penyerangan oleh pihak lawan ke tempat tinggal mereka itu selalu didahului oleh kedatangan mata-mata atau provokator. Untuk itu para pemuda setempat melakukan penjagaan di posko, memeriksa setiap orang yang lewat – yang dapat berlanjut menjadi penganiayaan – terhadap mereka yang dicurigai karena beragama yang berbeda dari para penjaga posko. Mereka mencurigai setiap orang asing atau yang tidak dikenal.

Ada semacam ketakutan massa yang dibarengi dengan pemujaan massa terhadap

simbol-simbol signifikan jatidiri mereka dan adanya musuh yang berupaya untuk menghancurkan simbol-simbol signifikan tersebut. Simbol-simbol signifikan tersebut berupa rumah ibadah dan keyakinan keagamaan mereka masing-masing. Upaya menghancurkan pihak lawan sebelum dihancurkan oleh lawan menjadi semacam histeria yang tidak terkontrol lagi. Setiap saat dua pihak yang bertikal siap mendengarkan berita mengenai apa yang dilakukan pihak lawan maupun pihak kawan, dan siap bertindak menghancurkan pihak lawan.

Di lain pihak, upaya penyelamatan diri dari kerusuhan juga dilakukan oleh warga masyarakat baik di kota Ambon maupun mereka yang tinggal di desa-desa di Ambon, yang wujudnya membela kerabat tanpa membedakan agama dan sukubangsanya, dan menyelamatkan siapa saja yang mereka kenal secara pribadi. Walau demikian, apa yang terjadi di kampung-kampung di kota Ambon berbeda dengan yang terjadi di desa-desa Ambon. Di kampung-kampung kota Ambon perbedaan sukubangsa dan agama nampaknya terasa sangat tajam. Mereka cenderung menjadi beringas, mendahului atau didahului oleh pihak lawan dalam adu cepat saling bunuh dan saling menghancurkan harta benda.

Sedangkan di desa-desa Ambon, terutama di desa-desa di mana masyarakatnya merupakan sebuah satuan kehidupan komuniti atau masyarakat yang masih utuh, ada kecenderungan untuk saling membela dan melindungi di antara mereka yang Ambon dengan yang Buton atau di antara para pemeluk agama Kristen dengan pemeluk agama Islam. Saling memusuhi dan saling menghancurkan di antara mereka yang berbeda sukubangsa dan keyakinan agama tidak dilakukan oleh sesama warga desa tetapi oleh warga desa lain yang menyerbu masuk untuk membunuh dan menghancurkan lawan sukubangsa dan keyakinan keagamaan. Pada waktu warga Ambon di sebuah desa tidak mampu melindungi warganya yang Buton, warga Ambon mengantarkan warga Buton ke Kantor Pemda untuk dilindungi dari serangan pihak lawan karena mereka di desa tersebut tidak mampu untuk melindunginya. Warga masyarakat desa-desa yang mempunyai hubungan *pela* juga saling mengingatkan satu sama lain mengenai hubungan *pela* mereka itu.

KESIMPULAN

Kerusuhan massal terjadi karena masyarakat hidup dalam ketidakadilan dan ketidak-

amanan yang disebabkan oleh tidak adanya patokan hukum yang dapat dipegang, dan karena hukum yang berlaku ada di tangan preman atau oknum. Preman atau oknum menguntungkan para pendatang — yang mendominasi kebudayaan dan politik masyarakat setempat—padahal sebelumnya budaya dan politik didominasi oleh kebudayaan masyarakat Ambon yang mementingkan kemajemukan. Dominasi secara tidak adil yang antikemajemukan dan dengan dibarengi oleh adanya kekuatan preman dan oknum, telah menghasilkan frustrasi sosial yang berkepanjangan dan itu terus berkumulasi.

Respon warga masyarakat Ambon setempat dalam mengatasi frustrasi sosial yang berkepanjangan tersebut adalah sama dengan cara-cara preman dari oknum, yaitu kekerasan. Karena tidak ada cara atau alternatif lain untuk mengatasinya.

Walaupun konflik yang semula dilakukan dengan mengaktifkan kesukubangsaan telah bergeser menjadi mengaktifkan keyakinan keagamaan, ini tidaklah berarti bahwa *animosity* (kebencian yang penuh dendam) dari Orang Ambon terhadap Orang BBM pendatang baru di kota Ambon menjadi hilang dan digantikan oleh kebencian yang mendalam terhadap mereka yang berbeda

keyakinan keagamaannya. Penggeseran pengaktifan konflik antar-sukubangsa menjadi konflik antara penganut Islam dengan Kristen, dapat disimpulkan dari kasus kerusuhan massal yang dilakukan oleh warga desa Hitu dan desa-desa Islam lainnya yang bermula dari adanya berita melalui telepon yang tidak jelas siapa peneleponnya, yang diterima di Desa Hitu (wawancara dengan tersangka provokator Wahab yang masih ditahan di Polda) bahwa "Masjid Al Fatah dibakar dan minta bantuan".

Segera setelah berita telepon itu diterima, sejumlah warga Desa Hitu dan desa-desa Islam lainnya secara rombongan berangkat menuju kota Ambon. Tetapi di desa Poka mereka itu dihentikan oleh pasukan Brimob yang mengharuskan mereka pulang ke desa masing-masing. Kegagalan rombongan umat Islam dari Hitu dan desa Islam lainnya menuju Ambon menyebabkan mereka melampiaskan kemarahan dengan cara-cara membakari desa-desa, rumah-rumah, dan gereja, serta membunuh sejumlah warga desa yang beragama Kristen, di sepanjang perjalanan pulang mereka ke desa-desa masing-masing. Balas-membalas di antara mereka yang berbeda keyakinan keagamaannya, mereka lakukan dengan menggunakan berbagai isu balas

dendam atau tercemarnya kehormatan yang nampaknya sengaja dibesar-besarkan. Tanpa pemicu atau tanpa penyebar isu atau provokator, barangkali konflik ini sudah dapat diredam lebih awal.

Konflik yang terwujud sebagai kerusuhan massal di Ambon juga tidak dapat segera dihentikan, karena nampaknya Polri (Polda dan jajarannya) tidak siap menghadapi kerusuhan massal semacam ini. Polda dan Polres tidak mempunyai dokumen atau keterangan tertulis mengenai kondisi Ambon dan masyarakatnya serta berbagai situasi yang ada, baik sebelum maupun selama terjadi kerusuhan. Pengetahuan mengenai kondisi Ambon dan masyarakatnya serta situasi-situasinya hanya ada dalam pengetahuan di kepala beberapa pejabat Polda dan Polres.

Begitu juga program penanganan kerusuhan Ambon yang ditangani oleh Polda dan jajarannya tidak dilakukan secara strategis dan sistematis tetapi secara reaktif. Tidak ada kebijakan berikut program-program dan strategi-strategi serta rencana-rencana, serta tahap-tahapan pelaksanaannya, yang tujuan akhirnya adalah mengakhiri kerusuhan massal itu. Polda juga tidak mampu membangun kerjasama dan koordinasi dengan Korem, yang menggunakan pasukan organik setempat, dan memper-

oleh bantuan personel dari Kostrad Ujung Pandang yang terkesan bertindak sendiri di luar jangkauan Kodal yang berada di bawah Komando Polda.

Model Keamanan Sektor yang sebetulnya dapat berjalan bagus juga terkesan reaktif karena tidak adanya pedoman operasional tertulis yang baku yang mencakup tahapan-tahapan pelaksanaan kerja dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari Operasi Keamanan Sektor tersebut, walaupun Keamanan Sektor ini telah dibantu secara penuh oleh satuan marinir dari Jawa.

Pengambilalihan Kodal oleh Korem, yang menekankan upaya peredaman kerusuhan massal pada penembakan terhadap pelaku di tempat dan pada perlucutan atau *sweeping* senjata tajam dan senjata api serta KTP adalah tepat (lihat lampiran: Program Kegiatan Peningkatan Keamanan). Karena itu sebuah kerusuhan bersenjata hanya mungkin dihentikan dengan melucuti senjata para pelaku dan tindakan tembak di tempat dan/atau menangkapi para pelaku perusuhan. Hal itu harus dilakukan agar para perusuh tidak berlari-lari meneruskan aksi-aksinya, dan agar penegakan hukum yang berlaku segera dapat dilakukan untuk memulihkan suasana kehidupan yang aman bagi warga masyarakat.

Gubernur dan Pemda yang berada dalam posisi sulit tidak mampu untuk turut menangani kerusuhan secara sipil, karena tidak mempunyai informasi intelejen mengenai kekuatan-kekuatan konflik yang sedang bertempur dalam masyarakat, dan juga tidak mempunyai kekuatan yang dapat memaksa diberlakukannya sesuatu kebijakan dalam situasi yang rusuh tersebut. Bahkan kantor-kantor pemerintah, walaupun buka tetapi tidak ada staf pegawainya karena mereka ini juga takut dibantai dalam perjalanan ke kantor dan pulang ke rumah. Upaya-upaya perdamaian dengan menggunakan pengaruh para tokoh agama dan tokoh adat juga tidak efektif karena keterbatasan-keterbatasan tersebut.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sejumlah rekomendasi untuk penanganan kerusuhan Ambon diajukan untuk dibahas oleh tim peneliti yang kemudian dibawa secara lisan dan tertulis kepada Jenderal Pol. Roesmanhadi, sebagai Kapolri. Rekomendasi tersebut mencakup: (1) Segera mengembalikan keteraturan dan ketertiban sosial masyarakat kota Ambon dan sekitarnya, setelah Korem dan aparat kea-

manan berhasil menghentikan kerusuhan massal. (2) Mencabut SKB 3 Menteri. (3) Pembinaan Polda. (4) Menangkal terulangnya kembali kerusuhan. (5) Penguatan potensi masyarakat untuk dapat menangkal terjadinya kerusuhan.

Perincian dari rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam upaya mengembalikan keteraturan sosial dan ketertiban masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya untuk membersihkan Ambon dan sekitarnya dari cengkeraman preman. Karena, pemicu utama dari kerusuhan Ambon sebenarnya adalah para preman dan oknum yang membeking atau menjadi patron para preman tersebut.
- (2) Pencabutan SKB 3 Menteri mengenai upacara-upacara seremonial keagamaan, untuk mengendorkan batas-batas sosial dan budaya di antara penganut yang berbeda keyakinan keagamaannya. Di samping itu, ada baiknya bila gubernur dan tokoh-tokoh agama yang berbeda dapat bersama-sama membuat program kegiatan upacara-upacara seremonial keagamaan yang saling melibatkan satu sama lainnya dalam suasana persaudaraan, sebagaimana yang terjadi sebelum adanya SKB 3

Menteri dan yang upacara seremonial ini sejalan dengan apa yang terkandung dalam upacara "*panas pela*". Pemda Ambon juga dapat mengusulkan kepada Menteri P dan K dan Menteri Agama untuk mengubah kurikulum pendidikan agama, mulai dari tingkat SD sampai Universitas, sehingga tidak menghasilkan umat beragama yang berwawasan sempit, dan yang tidak lagi menggunakan agama dan Tuhan-nya sebagai acuan dasar untuk saling bunuh dan menghancurkan.

- (3) Pembinaan fungsi Polda perlu dilakukan. Fungsi binkamtibmas di Polda dan jajarannya sebaiknya diaktifkan, sehingga dapat proaktif dalam menanggapi dan meredam setiap gejala awal kerusuhan. Dokumentasi tertulis mengenai masyarakat dan kebudayaannya yang tercakup dalam wilayah Polda, Polres, dan Polsek, sebaiknya dibuat dan diacu dalam kegiatan-kegiatan pemolisian masyarakat. Data yang ada tersebut sebaiknya selalu diperbaharui sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, fungsi intel-pampol perlu ditingkatkan oleh Polda dan jajarannya, sehingga Polda mampu

mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial, sebagai dampak dari dinamika perkembangan masyarakat, yang mempunyai potensi konflik massal yang melibatkan kesukubangsaan dan keyakinan keagamaan, serta berbagai kerusuhan massal lainnya.

- (4) Dalam upaya untuk menangkal terulangnya kerusuhan massal antar-sukubangsa, ada baiknya dikembangkan isu kemajemukan atau *Bhineka Tunggal Ika* oleh Gubernur dan Pemda dalam berbagai kebijakan pemerintahannya. Karena, masyarakat Ambon dan Propinsi Maluku adalah masyarakat majemuk. Sebuah upaya rekonsiliasi atau perdamaian abadi di antara kelompok dan warga yang terlibat konflik berkepanjangan dan merugikan tersebut harus diupayakan oleh Gubernur dan Pemda, dengan dukungan penuh dari Polda dan Korem. Walaupun kota Ambon dan sekitarnya telah kembali dalam keadaan aman, berkat tekanan operasional oleh Korem, tetapi kemungkinan munculnya kembali kerusuhan dapat saja terjadi lantaran dendam kesumat dari para keluarga korban. Dukungan moral, spiritual, dan material bagi korban harus diupayakan

oleh Pemda dan masyarakat. Untuk menegakkan keadilan dan rasa aman maka fungsi polisi harus dikembalikan sebagaimana seharusnya. Polda harus mampu melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri mengenai anggota-anggotanya yang berpihak dalam kerusuhan, dan mengambil tindakan-tindakan yang perlu agar di masa mendatang tidak terjadi lagi. Dengan kata lain, tugas utama Polda setelah kerusuhan adalah membangun kebudayaan polisi yang menunjukkan citranya sebagai penegak hukum dan pengayom serta pelayan bagi keamanan masyarakat.

- (5) Mengingat bahwa kerusuhan Ambon dipicu oleh ulah preman, maka salah satu cara yang terbaik adalah memperkuat potensi-potensi masyarakat untuk dapat menangkal konflik-konflik antar-sukubangsa dan keyakinan keagamaan yang saling menghancurkan. Kemunculan "pasar kaget" (pasar kakilima) yang para pedagangnya adalah orang Ambon, sebaiknya dibina sehingga dapat berfungsi secara lebih baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari warga Ambon di masa transisi pasca kerusuhan.

LSM dan Pemda dapat membantu peningkatan mutu dari para pedagang kakilima tersebut, baik dalam hal modal maupun dalam hal profesionalisme pelayanan jasa kepada konsumen.

Pembangunan pasar dan penataan permukiman kembali yang telah berantakan karena kerusuhan, harus direncanakan dengan memperhatikan corak kemajemukan masyarakat kota Ambon dan juga Propinsi Maluku. Tempat-tempat umum yang dapat berfungsi mengakomodasi perbedaan-perbedaan sukubangsa dan keyakinan keagamaan serta berbagai kelas sosial, sebaiknya didesain tidak untuk didominasi oleh suatu suku-bangsa atau suatu kelompok keyakinan keagamaan tertentu. Dan lebih-lebih lagi supaya tempat-tempat umum tersebut tidak didominasi oleh preman dan oknum.

Penghidupan kembali dan upaya penguatan sistem budaya Ambon tradisional harus dipikirkan mulai dari sekarang, terutama unsur-unsur budayanya yang fungsional dalam mengakomodasi perbedaan-perbedaan sukubangsa dan keyakinan keagamaan. Hal ini harus dipikirkan

mulai dari sekarang sebagai upaya pembendungan cara berpikir skripturalis yang sektarian dan monolitik dari keyakinan agama-agama besar yang berpotensi konflik. Untuk itu patut dipikirkan upaya untuk menghidupkan kembali konsep desa atau *negeri* sebagai sebuah satuan budaya berikut pranata-pranata sosialnya yang berlaku sebelum terjadi kerusuhan. Penghidupan kembali konsep desa sebagai *negeri* adalah sama dengan menghidupkan hak budaya komuniti.

Dengan adanya hak komuniti maka berbagai bentuk pranata *pela*, dan terutama *pela gandong*, dapat dihidupkan untuk dapat berfungsi kembali dalam kehidupan warga desa sebagai mekanisme kontrol dalam menciptakan keteraturan sosial yang ada di pedesaan setempat. Dengan adanya hak budaya komuniti dan berfungsinya *pela* maka masyarakat di daerah pedesaan tidak akan mudah terbawa oleh pengaruh agitasi atau provokasi pihak-pihak yang membangkitkan semangat sentimen keagamaan yang sektarian, sebagaimana yang telah terjadi selama kerusuhan massal di Ambon. Ada baiknya bila Gubernur dan Pemda Maluku

mengusulkan kepada Mendagri, khususnya Dirjen PUOD untuk mencabut UU no. 5 Tahun 1979. Begitu juga berbagai bentuk *pela* harus dihidupkan atau dipanaskan kembali untuk menjalin kehidupan sosial warga yang harmonis sesuai dengan norma-norma setempat yang berlaku.

- (6) Penanganan korban kerusuhan yang sekarang menjadi pengungsi sebaiknya dilakukan secara bersungguh-sungguh. Mereka itu patut mendapat bantuan untuk dapat mengatasi berbagai kesulitan yang mereka hadapi, baik dalam bentuk bantuan ekonomi maupun dalam bentuk kesejahteraan fisik dan jiwa. Seharusnya mereka memperoleh bantuan dari pemerintah, dan dengan dibantu oleh LSM, untuk dapat kembali berfungsi dalam masyarakat sebagai tenaga-tenaga produktif dalam bidang-bidang yang menjadi keahlian masing-masing. Begitu juga mereka berhak memperoleh bimbingan kejiwaan untuk menghilangkan trauma berat akibat kerusuhan dan menghilangkan dendam kesumat yang dipunyai.

EPILOG

Di antara sejumlah rekomendasi yang saya ajukan dan menjadi rekomendasi Tim Peneliti yang disampaikan kepada Kapolri (Jenderal Pol. Roesmanhadl), adalah diaktifkannya *pela gandong*, dan digunakan *pela gandong* tersebut sebagai sebuah ikatan kekerabatan untuk mendamaikan mereka yang konflik. Rekomendasi ini sejalan dengan rekomendasi yang dibuat oleh Rekonstalisasi Kerusuhan Ambon, dan telah dilaksanakan oleh Pemda Propinsi Maluku yang berpusat di kota Ambon, pada akhir Mei 1999. Sayangnya upacara *pela gandong* tersebut diselenggarakan sebagai sebuah upacara seremonial belaka, padahal seharusnya diselenggarakan sebagai sebuah upacara ritual yang sakral. Karenanya, makna upacara *pela gandong* yang telah diselenggarakan tersebut hanya bermakna seremonial tanpa ikatan-ikatan dan sanksi-sanksi sakral bagi para pelanggarnya.

Seharusnya upacara *pela gandong* sebagai puncak disahkannya rekonsiliasi atau rujuk konflik sosial Ambon didasari oleh adanya perundingan perdamaian yang melibatkan berbagai unsur dari masing-masing kelompok yang berkonflik dalam kerusuhan tersebut. Di antara unsur-unsur

terpenting dalam perundingan perdamaian konflik adalah: (1) Adanya pihak penengah atau mediator untuk menjadi juru-damai yang tidak memihak, yang dihormati oleh pihak-pihak yang berkonflik, dan yang mempunyai kekuasaan untuk membuat pihak-pihak yang berkonflik mematuhi keputusan-keputusan yang diusulkan dan ditetapkannya. (2) Adanya kompensasi bagi masing-masing pihak yang konflik atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pihak lain. Kedua pihak yang berkonflik harus dapat mencapai persetujuan mengenai saling ganti rugi jiwa dan harta benda, sehingga tercapai suatu persetujuan yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak tersebut sebenarnya telah sama besar kerugian yang mereka derita masing-masing (Suparlan, 1996b).

Kedua unsur terpenting dalam upaya penyelesaian konflik di Ambon tidak dipenuhi syarat-syaratnya dan karena itu juga setelah reda sebentar karena berada di bawah komando Korem, kerusuhan mulai lagi bahkan lebih dahsyat daripada sebelumnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN YANG DIGUNAKAN

Bartels, Dieter (1977), *Guarding the Invisible Mountain: Inter village alliances, religious syncretism*

and ethnic identity among Ambonese Christian in the Molluccas. Ph.D thesis Cornell University.

Boedhisantoso, S. (1999), *Kebringasan Sosial di Ambon*. Makalah.

Bruner, E.M. (1974), "The Expression of Ethnicity in Indonesia", dalam Abner Cohen (editor), *Urban Ethnicity*. London: Tavistock, hlm. 251-280.

Lokollo, J.E., dkk (1997), *Seri Budaya Pela Gandong dari Pulau Ambon*. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.

Patikayhatu, J.A., dkk (1997), *Sejarah Asal-Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri di Pulau Ambon*. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.

Sarwono, Sarlito W. (1999), *Hasil Penelitian Kerusuhan Ambon*. Makalah.

Suparlan, Parsudi (1999a), *Kerusuhan Kalbar, Kupang, dan Ambon: Permasalahan dan Penanganannya*. Makalah 'Seminar Disintegrasi Sosial: Masalah dan Alternatif Pemecahannya'. FISIP-U.I., Depok 22 Februari 1999.

(1999b), "Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Th.23, No. 59, hlm. 7-19.

(2000), "Kerusuhan Sambas", *Jurnal Polisi Indonesia*, Th.2, No.2, hlm. 71-85.

Tim Rujuk Sosial Konflik Ambon (1999), *Kompilasi Hasil Diskusi 4 dan 5 Maret 1999*. Laporan disampaikan kepada Gubernur/Kepala Dati I Maluku.

Tirtosudarmo, Riwanto (1999),
"Konflik Majemuk Meledakkan
Ambon", *Majalah DR.* 31,
Th.30, 15-30 Maret 1999, hlm.
54-55.

Unepetty, T.J.A. (1996), *Perwujudan
Pela Dalam Kehidupan Sosial
Budaya Masyarakat Maluku.*
Jakarta: Dep. P dan K.

